



PUTUSAN

Nomor **33/Pdt.G/2020/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah dan saat ini berada di Jalan Raya Lintas Timur II Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek (Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/028/III/2011 tanggal 07 Januari 2020, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik ;

2.Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Bukit Merapin, Gerunggang, dan terakhir sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nuraya Syaquila binti Jefri Abdillah, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Oktober 2011 ;

3.Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4.Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

a. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

b. Tergugat saat ini menjalani masa hukuman pidana perkara Narkotika jenis Shabu dan dituntut pidana penjara 5 tahun 6 bulan yang dibuktikan dengan Salinan Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2018/PN.Pgp. ;

5.Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Hal. 2 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober tahun 2011, disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai transaksi yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat menghindar dan tidak jujur terhadap Penggugat, terjadilah cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sempat menendang Penggugat yang saat itu baru saja melahirkan selama 7 hari, mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan pertengkaran lalu pisah rumah sejak awal tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Nirwana Apriza Bin Iskandar) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus



orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0094/028/III/2011, tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang. Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000 dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.1 ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor: 205/Pid.Sus/2018/PN Pgp, tanggal 16 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000 dan telah dinazegelen bukti P2;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat bernama Hendra Yuda Bin Sodri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Jalan Selanget, RT 006 RW 002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dimana keluarga tersebut menyatakan kalau benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk Majelis, namun karena kurangnya jumlah Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang, Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya Nomor 330/KMA/Hk.05/11/2019 telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bersidang dengan Hakim Tunggal. Untuk itu perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 5 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek.

Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين
ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak yang dimaksud diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun ;

Hal. 6 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



- Bahwa Tergugat Telah dihukum 5 tahun 6 bulan atas kasus Narkoba ;

- Bahwa Penggugat mohon dicerakan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dikatakan untuk perceraian yang didasarkan dengan pasal 19 huruf c (yang dihukum lebih dari lima tahun), cukup dibuktikan dengan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hokum Tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti P.2 berupa Petika Putusan Nomor 205/Pid.Sus/202018/PN.Pgp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Petikan Putusan tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti kalau Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan.

Hal. 7 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Oleh karena itu dalil Penggugat untuk diceraikan dengan dasar pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti kalau Tergugat Telah dijatuhi putusan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Juli 2018 dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pangganti Pengadilan Agama Pangkalpinang, dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang bertemu langsung dengan Tergugat di Lapas Narkoba Pangkalpinang. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat dihukum 5 tahun 6 bulan penjara dan telah dilakukan eksekusi dimana saat ini Tergugat sejak tahun 2018 telah ditahan di Lapas Narkoba Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى
القاضي بينة الزوجة أو اعترف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه د و أم العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Hal. 8 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp



3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	300.000,00
4. PNBP Panggilan	20.000,00
5. Redaksi	10.000,00
6. Meterai	6.000,00
Jumlah	<u>416.000,00</u>

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan No. 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp